



KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DPR: URGENSI PENGUATAN KEDUDUKAN WAKIL RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NORMA DAN KONSTITUSI

M.Iqbal.M.Ag¹, Samuel Natanael Siregar², Difa Aprilia Marpaung³, dkk.

Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: Email : m.iqbal@unimed.ac.id¹, samskie0812@gmail.com²,
difamarpaung7@gmail.com³, dkk

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perspektif norma dan konstitusi, mengidentifikasi penyebab krisis kepercayaan publik, serta menegaskan urgensi penguatan peran wakil rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan normatif-yuridis melalui telaah terhadap UUD 1945, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan laporan survei kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap DPR disebabkan oleh kesenjangan antara norma konstitusional yang menempatkan DPR sebagai representasi rakyat dan praktik politik yang terjadi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR perlu memperkuat posisinya dengan menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Penguatan ini diperlukan guna memulihkan legitimasi publik, memperkuat kualitas demokrasi, dan memastikan DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal.

Kata kunci: DPR, kepercayaan publik, norma, konstitusi, demokrasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the position of the Indonesian House of Representatives (DPR) from a normative and constitutional perspective, identify the root causes of the public trust crisis, and highlight the urgency of strengthening the role of elected representatives within Indonesia's constitutional framework. Using a normative-juridical approach, this research is based on a literature review of the 1945 Constitution, statutory regulations, academic works, and public trust survey reports. The findings reveal a significant gap between constitutional norms which designate the DPR as the people's representative and the actual political practices. This discrepancy is a major factor contributing to declining public trust. To address the issue, the DPR must reinforce its institutional integrity by upholding the principles of accountability, transparency, and integrity. Such efforts are essential to restoring public legitimacy, enhancing democratic quality, and ensuring the effective execution of the DPR's constitutional functions.

Keywords: House of Representatives, public trust, constitutional norms, accountability, democracy

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat memegang peranan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, DPR menghadapi penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang cukup signifikan. Berbagai survei nasional menunjukkan bahwa DPR menempati posisi sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik yang paling rendah, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara wakil rakyat dan harapan masyarakat. Penurunan kepercayaan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti proses legislasi yang dianggap kurang transparan dan cenderung menguntungkan kelompok elit, minimnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, serta munculnya kasus korupsi dan skandal yang melibatkan anggota DPR.

Pada tahun 2025, situasi politik Indonesia mengalami puncak krisis kepercayaan terhadap DPR yang diwujudkan melalui demonstrasi besar-besaran bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia" di depan Gedung DPR RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak wajar, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Massa aksi yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek daring, menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran DPR, penghentian praktik korupsi, serta pembubaran DPR sebagai bentuk protes atas kinerja yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat.

Awalnya berlangsung secara damai, aksi demonstrasi tersebut kemudian berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan dan kerusuhan di beberapa daerah, yang menunjukkan betapa dalamnya jurang kepercayaan antara wakil

rakyat dan masyarakat. Fenomena ini menjadi gambaran nyata dari krisis legitimasi politik yang tengah dialami DPR dan menuntut penanganan segera agar demokrasi dan stabilitas nasional dapat terjaga. Oleh karena itu, penguatan posisi DPR secara normatif dan konstitusional menjadi hal yang sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memperbaiki fungsi legislatif agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Krisis kepercayaan yang dialami DPR mencerminkan adanya penurunan legitimasi politik yang berpotensi mengancam kestabilan demokrasi. Apabila masalah ini tidak segera ditangani, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dapat memicu apatisme politik, kurangnya partisipasi dalam pemilihan umum, serta meningkatnya gelombang protes yang berisiko mengganggu ketertiban sosial. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme internal DPR, peningkatan transparansi dalam setiap proses, serta penegakan etika politik yang lebih ketat menjadi langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkokoh posisi DPR sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab dan memiliki kredibilitas tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi masalah krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Selanjutnya ditetapkan tujuan penelitian. Langkah berikutnya dilakukan dengan pengumpulan data, lalu mengidentifikasi data dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan pemberian rekomendasi terhadap kedudukan DPR untuk melakukan reformasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Fokus utama penelitian ini (objek penelitian) adalah menganalisis kedudukan wakil rakyat dalam perspektif norma dan konstitusi, serta mengaitkannya dengan fenomena krisis kepercayaan publik

terhadap DPR di Indonesia.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dimana sumber data utama diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait lembaga legislatif, serta peraturan perundang-undangan lainnya, ditambah dengan literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, laporan survei kepercayaan publik, dan berita yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

HASIL PENELITIAN

Penyebab krisis kepercayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama krisis kepercayaan publik terhadap DPR adalah lemahnya akuntabilitas dan minimnya transparansi dalam praktik politik maupun pengelolaan kewenangan Fenomena krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kompleksitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik struktural maupun situasional. Krisis ini terlihat dari berbagai survei nasional yang menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga negara dengan tingkat kepercayaan terendah. Misalnya, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2023 menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR berada di bawah 50%, jauh di bawah TNI (88%), atau Presiden (72%). Rendahnya kepercayaan ini bukan tanpa alasan, melainkan dilatarbelakangi oleh serangkaian persoalan, seperti maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, praktik politik transaksional, serta pengesahan undang-undang yang dinilai tidak pro-rakyat.

Salah satu penyebab utama adalah lemahnya akuntabilitas dan transparansi DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran, yang secara signifikan mengikis kepercayaan publik. Minimnya mekanisme

pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi menimbulkan persepsi negatif sekaligus menurunkan tingkat partisipasi politik di tengah meningkatnya polarisasi sosial.

Beberapa waktu belakangan ini, gelombang unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Peningkatan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat disebut-sebut sebagai pemicu unjuk rasa. Namun, lebih dari itu, demonstrasi meledak sebagai puncak kekecewaan publik terhadap pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat yang sering kali tidak berpihak kepada rakyat dan justru menguntungkan ego sektoral.

Menurut peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya, emosi masyarakat yang meluap adalah puncak gunung es dari disconnect antara rakyat dan lembaga perwakilan mereka. "Ketidakpuasan ini muncul karena rendahnya kepercayaan pada institusi demokrasi yang sejatinya menjadi pilar kedaulatan rakyat. Berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan oleh penulis, salah satu contoh yang dapat ditemui saat ini adalah maraknya aksi demo yang Dipicu oleh kekurangpekaan DPR terhadap situasi dan kondisi rakyat saat ini, dan juga 'sikap arogansi' oknum anggota DPR yang seolah-olah 'melecehkan' rakyat menjadikan gelombang besar demonstrasi di mana-mana. Dalam kondisi masyarakat yang penuh keprihatinan, pemerintah megambil kebijakan yang menaikkan anggaran DPR sebesar Rp 50 juta untuk tunjangan rumah. Kebijakan yang kurang populis ini jelas mencederai hati rakyat yang serba kesusahan. Keadaan ini dipetraparah dengan sikap arogan anggota DPR yang setelah rapat kenaikan gaji belum selesai demo terjadi, kembali ditambah pelanggaran prosedur aparat kepolisian saat mengantisipasi gelombang demonstrasi sehingga melakukan "tabrak lari" yang membuat seorang kurir pengendara Ojol meninggal di tempat. Semakin memicu anarkisme demonstran.

Karuan saja anarkis ini menjadikan lautan api. Pembakaran terhadap gedung DPR/DPRD dan Pos-PoS Polisi serta fasilitas umum menjadi sasaran tembak massa demontrans.

Dengan banyaknya kasus yang terjadi mengenai permasalahan DPR mulai dari kinerja DPR yang tidak sesuai atas target pencapaian mereka, lalu tunjangan gaji yang mereka dapatkan membuat masyarakat Indonesia saat ini tidak puas atas dampak yang mereka rasakan terkait pencapaian DPR, kurangnya keterbukaan dari DPR menjadi salah satu beberapa faktor atas aksi besar yang dilakukan para masyarakat Indonesia mulai dari mahasiswa, ojol, para buruh, bahkan content creator ikut turun ke lapangan dalam menunjuk aspirasi mereka.

Urgensi Penguatan Kedudukan DPR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kedudukan DPR sangat urgen dalam rangka memperbaiki kualitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Penguatan kedudukan DPR harus diarahkan pada peningkatan integritas, keterbukaan, dan profesionalisme sehingga fungsi DPR benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Urgensi penguatan kedudukan DPR tidak hanya berkaitan dengan posisi formalnya dalam struktur ketatanegaraan, tetapi juga menyangkut bagaimana lembaga ini menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan secara efektif.

Di sisi lain, transparansi penggunaan anggaran DPR pun masih lemah. Publik sulit mengakses informasi terkait alokasi dana reses, laporan kinerja, hingga hubungan anggaran politik dengan kementerian. Hal ini membuat lembaga perwakilan kerap dianggap sebagai “stempel” kebijakan eksekutif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa urgensi penguatan kedudukan DPR semakin nyata bila dikaitkan dengan persoalan politik dan ekonomi Indonesia belakangan ini. DPR yang semestinya berfungsi sebagai representasi rakyat justru

sering mengambil keputusan yang memicu ketidakpuasan masyarakat.

Salah satu isu aktual adalah kebijakan kenaikan pajak. Dalam situasi ekonomi yang masih berat, rakyat menanggung beban kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, dan rendahnya daya beli. Namun, DPR bersama pemerintah justru menyetujui regulasi yang memperbesar pungutan pajak tanpa memberikan solusi konkret bagi kesejahteraan rakyat kecil. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sensitivitas DPR terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, muncul pula kontroversi terkait kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Ketika rakyat masih bergulat dengan pengangguran, kemiskinan, dan ketidakpastian ekonomi, DPR justru disorot karena mengutamakan kepentingan internal mereka. Fenomena ini menegaskan adanya jarak yang semakin lebar antara DPR dan rakyat yang diwakilinya. Keputusan semacam ini memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap DPR dan memperkuat stigma bahwa lembaga legislatif lebih berpihak pada kepentingan elit daripada kepentingan bangsa.

Kedua fenomena tersebut menggambarkan mengapa penguatan kedudukan DPR menjadi sangat urgen. DPR harus ditegaskan kembali sebagai lembaga yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Urgensi penguatan DPR tampak pada tiga aspek utama:

1. Fungsi Legislasi

DPR perlu memperkuat perannya agar peraturan undang-undang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan oligarki elit politik.

2. Fungsi Pengawasan

Penguatan kedudukan DPR menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas kontrol terhadap jalannya pemerintahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel dan pro-rakyat, yang sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

3. Fungsi Anggaran

DPR harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran. Misalnya dengan membuka akses publik terhadap laporan keuangan, perjalanan dinas, serta penggunaan anggaran internal.

Kedudukan Wakil Rakyat Menurut Norma dan Konstitusi Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wakil rakyat di Indonesia, yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah diatur secara jelas dalam norma hukum dan konstitusi. UUD 1945, khususnya Pasal 19 hingga Pasal 22B, menegaskan bahwa DPR adalah lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, secara normatif dan konstitusional, kedudukan wakil rakyat sangat strategis karena menjadi representasi langsung dari kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Dari perspektif normatif, DPR diposisikan sebagai lembaga perwakilan yang tidak hanya berperan dalam menyusun undang-undang, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum. Norma ini menegaskan bahwa wakil rakyat memiliki mandat konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta memastikan prinsip checks and balances berjalan.

Namun penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Secara konstitusi, DPR semestinya menjadi pilar demokrasi yang kokoh, tetapi dalam praktiknya DPR kerap dipandang lebih mementingkan kepentingan politik dan kelompok tertentu. Hal ini tampak dari munculnya undang-undang yang menuai penolakan publik, lemahnya pengawasan terhadap pemerintah, hingga rendahnya transparansi dalam fungsi anggaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kedudukan wakil rakyat dijamin konstitusi, pelaksanaan fungsi konstitusionalnya masih menghadapi hambatan serius.

Penelitian mengindikasikan bahwa DPR saat ini tengah mengalami krisis legitimasi. Persepsi negatif masyarakat semakin diperburuk oleh dominasi kepentingan partai politik dalam mekanisme internal DPR serta kontroversi terkait regulasi, seperti revisi Undang-Undang MD3. Demonstrasi besar yang terjadi pada 25 Agustus 2025 menjadi bukti nyata kegagalan DPR dalam memenuhi mandat konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.

Dalam konteks norma dan konstitusi, penguatan posisi DPR menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Penguatan tersebut harus didasarkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi serta pengawasan DPR, sehingga DPR dapat berperan secara optimal sebagai representasi yang sesungguhnya dari aspirasi rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Salah satu hasil penting penelitian ini adalah urgensi transparansi keuangan sebagai pintu masuk penguatan DPR. Ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran internal DPR, perjalanan dinas, dan fasilitas anggota sering kali menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penerapan sistem keterbukaan informasi, publikasi laporan keuangan secara berkala, serta adanya audit independen yang dapat diakses masyarakat, akan memperkuat legitimasi DPR. Transparansi keuangan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga simbol komitmen DPR untuk menjalankan amanah rakyat.

KESIMPULAN

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI pada tahun 2025 mencerminkan ketidaksesuaian antara peran dan kedudukan DPR sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dengan praktik kelembagaan yang berlangsung saat ini. Rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran DPR berkontribusi pada penurunan partisipasi politik dan meningkatnya polarisasi di kalangan masyarakat. Selain itu, dominasi kepentingan partai politik dalam mekanisme internal DPR serta kontroversi terkait perubahan Undang-Undang MD3 semakin menurunkan legitimasi publik terhadap lembaga tersebut. Demonstrasi besar yang terjadi pada 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI menjadi simbol dari akumulasi kekecwaan mendalam rakyat terhadap wakilnya.

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki posisi yang strategis dalam konstitusi dengan fungsi utama legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, krisis legitimasi yang dialami menunjukkan perlunya penguatan kedudukan DPR berdasarkan norma dan ketentuan konstitusional agar DPR dapat menjalankan tugasnya secara efektif, akuntabel, dan representatif. Upaya penguatan ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia.

SARAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan reformasi menyeluruh yang meliputi peningkatan akuntabilitas dan transparansi agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berjalan optimal. Mekanisme internal terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dan pemecatan anggota harus diperbaiki agar lebih mengutamakan aspirasi rakyat daripada kepentingan partai. DPR juga harus memperkuat komunikasi dan keterlibatan publik dalam proses politik agar representasi wakil rakyat menjadi lebih nyata. Evaluasi regulasi yang menghambat kritik konstruktif perlu dilakukan agar DPR kembali menjadi lembaga legislatif yang responsif dan demokratis, sehingga legitimasi dan

kepercayaan publik dapat pulih dan demokrasi Indonesia semakin kokoh.

DAFTAR RUJUKAN

- Antaranews.com. (2025, September 2). Pengamat Unej Paparkan Solusi Atasi Krisis Kepercayaan Rakyat. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/5083545/pengamat-unej-paparkan-solusi-atasi-krisis-kepercayaan-rakyat>
- Asbanu, N. R., Belo, C. M. F., & Saingo, Y. A. (2025). Analisis Peran DPR dalam Menyuarkan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila. Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 3(1). <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>
- BBC Indonesia. (2025, September 1). Mengapa aksi demonstrasi berujung perusakan dan penjarahan? BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxp99z02gdo>
- Budidarsono, R. (2025). Position and Role of the People's Representative Council. Jakarta: Penerbit Konsensus.
- Benyal, H. S. (2020). Transformasi kewenangan DPD dalam ius constitutum ke arah ius constituendum demi kesetaraan dalam bikameral. Jurnal Panorama Hukum, 5(1), 77. ISSN 2527-6654.
- Jarrak Pos. (2025, February 19). Krisis Kepercayaan Publik terhadap DPR. Jarrak Pos. <https://www.jarrakpos.com/krisis-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-sudah-saatnya-dpr-berbenah-diri/>
- Kompas.com. (2025, August 22). Kenaikan Tunjangan DPR di Tengah Krisis Kepercayaan Publik. Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/22/14514441/kenaikan-tunjangan-dpr-di-tengah-krisis-kepercayaan-publik>

Miswar, & Firmanto, F. (2025). Kajian normatif tentang Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 8(1), 53. ISSN 2615-5583 (Online).

Tempo.co. (2025, August 31). Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>

Uinsa.ac.id. (2025, September 1). Menggugat DPR Melalui Demonstrasi Damai. UINSA. <https://uinsa.ac.id/blog/menggugat-dpr-melalui-demonstrasi-damai>

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 46.